

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA SUMBER REJO
KECAMATAN BATU KOTA BATU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Manajemen**

MANAJEMEN



**OLEH :
YUVENTUS JONI
2015120207**

**UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
FAKULTAS EKONOMI
MALANG
2022**

RINGKASAN

Di Dalam pengelolaan dan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan pembukuan dana desa, sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Beberapa siklus yang terus menerus menyatu dari satu tingkat ke tingkat berikutnya untuk membangun pengelolaan keuangan desa. Anggaran mengendalikan pengelolaan keuangan desa yang didasarkan pada tanggung jawab, akuntabilitas, dan partisipasi. Sebelum disahkannya UU Desa No. 6 Tahun 2014, UU No. 32 Tahun 2004 menjadi landasan bagi penyelenggaraan keuangan desa. Penerapan pengelolaan keuangan desa memicu upaya pengelolaan keuangan daerah yang didukung oleh Kementerian Keuangan. Banyak dari tantangan ini mungkin sulit untuk memperluas dan mendistribusikan pertumbuhan daerah secara merata, yang merupakan salah satu tujuan kebijakan dana desa.

Pengelolaan Keuangan Dana Desa ialah hal yang harus lebih diperhatikan. Penyelesaian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa. untuk mengetahui bagaimana Desa Sumberejo mematuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri. Tahun 2014 Peraturan Pengelolaan Keuangan Desa No. 113 merupakan tujuan dari penelitian .

Kata kunci: *Pengelolaan Dana Desa*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014, pengelolaan keuangan desa meliputi perancangan, pelaksanaan, pengelolaan, dan pembukuan dana desa. Beberapa siklus yang terus-menerus digabung dari satu tingkat ke tingkat berikutnya untuk membangun pengelolaan keuangan desa. Lanjut. Keuangan desa dikelola secara metodis, dengan anggaran, dan terbuka, demokratis, serta akuntabel.

sejak disahkan UU no 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pemdes akan mendapatkan dana yang cukup besar yang dapat ditangani dan ditangani secara efisien. Faktor terpenting dalam pengelolaan keuangan desa bukan hanya kebutuhan akan sarana dan prasarana pendukung, tetapi juga sumber daya masyarakat yang memiliki kompetensi dan dedikasi yang solid. Kami menyadari bahwa kepala desa dan perangkat desa saat ini kebanyakan adalah lulusan SMA dengan pengalaman akuntansi dan administrasi yang terbatas. Akibatnya, mereka kesulitan membuat laporan keuangan desa yang tidak boleh disepelekan karena jika terjadi kesalahan, laporan keuangan yang dihasilkan menjadi tidak akurat. Keadaan seperti itu akan meragukan bantuan dalam mengumpulkan laporan keuangan desa dan meminta pertanggungjawaban warga desa. Isu ini berdampak pada perangkat desa, bendahara, tidak hanya di Desa Sumberejo, Kecamatan Batu, atau Batu, tetapi di seluruh Indonesia.

Pengelolaan keuangan desa berdasarkan norma daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sampai dengan lahirnya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Jika dibandingkan dengan pilihan kelola keuangan daerah pilihan menteri keuangan , maka dalam menjalankan keuangan desa lebih substansial. Kendala ini dapat

menghambat tujuan program dana desa untuk meningkatkan suatu kesejahteraan dalam pembangunan yang berkeadilan. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji Tinjauan Pengelolaan Keuangan Dana Desa..

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan keuangan dan desa Sumberejo berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa?
2. Bagaimana laporan keuangan dana desa di Desa Sumberejo Kecamatan Batu Kota Batu?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui pengelolaan keuangan dan desa Sumberejo berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 1.3.2 Untuk mengetahui laporan keuangan dana desa di Desa Sumberejo Kecamatan Batu Kota Batu.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1 . Manfaat Teoritis

Kajian yang disajikan dalam makalah ini secara teori diharapkan dapat memperluas pemahaman pembaca tentang ilmu ekonomi, khususnya Manajemen, dengan menjadi bahan tambahan atau referensi.

2 . Manfaat bagi akademisi

Manajemen bermaksud agar penelitian ini memberikan lebih banyak rincian dan pengetahuan praktis kepada pembaca yang dapat mereka gunakan sebagai sumber pertanyaan tentang Tinjauan Keuangan Dana Desa..

3 . Manfaat bagi pemerintah

Dijadikan pedoman dalam mengambil keputusan ..

4 . Manfaat Bagi Universitas

untuk kepentingan mahasiswa S1 Universitas Tribhuwana Tungadewi, khususnya yang terdaftar di program studi Manajemen yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang Tinjauan Pengelolaan Keuangan Dana Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Muhammad Zainul. 2015. "Tinjauan atas pelaksanaan keuangan desa dalam mendukung kebijakan dana desa." *Jurnal ekonomi & kebijakan publik* 6.1 : 61-76.
- Arifiyanto, Dwi Febri, and Taufik Kurrohman. 2014. "Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Jember." *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* 2.3.
- Bachrein, Saeful. (2010). Pendekatan desa membangun di Jawa Barat: strategi dan kebijakan pembangunan perdesaan. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, 8(2), 133-149.
- Badan Pusat Statistik. (2011). Statistik keuangan pemerintahan desa 2010.
- Badan Pusat Statistik. (2012). Statistik keuangan pemerintahan desa 2011. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2013). Statistik keuangan pemerintahan desa 2012. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2014). Statistik keuangan pemerintahan desa 2013. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (Maret 2014). Laporan bulanan data sosial ekonomi, edisi 46. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Dini, Gemala Sari. (2010). Hubungan alokasi dana desa dengan pembangunan desa di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat. Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2012). Kebijakan hubungan keuangan pusat dan daerah 2012. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- KEBIJAKAN DANA DESA (Studi Empiris di Desa Ngabar Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto)." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)* 8.11.
- Kementerian Keuangan. (2014). Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Kurniawan, M. Yusron, and Ikhsan Budi Riharjo. 2019. "TINJAUAN ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM MENDUKUNG

Mahfudz. (2009). Analisis dampak alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, 5(1), 10-22.

Mangowal, Jack. (2013). Pemberdayaan masyarakat petani dalam meningkatkan pengembangan ekonomi perdesaan di Desa Tumani Kecamatan Maesan Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Governance*, 5(1), 90- 97.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Setyoko, Paulus Israwan. (2011). Akuntabilitas administrasi keuangan program Alokasi Dana Desa (ADD). *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 14-24.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.